Harian Jogja (Hal.3) **Senin, 15 Februari 2025**

Pemangkasan Anggaran Capai Rp260 Miliar

- Dari APBD reguler, efisiensi mencapai lebih dari Rp60 miliar.
- *Refocusing* anggaran dialihkan untuk sejumlah program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

DANUREJAN–Pemda DIY menyebut sedikitnya Rp60 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) reguler yang ditetapkan pada 2024 dipangkas menyusul adanya efisiensi anggaran. Jika ditambah dana keistimewaan (danais), total pemangkasan yang dilakukan Pemda DIY mencapai Rp260 miliar.

Yosef Leon Pinsker
yosef@harianjogja.com

Sekda DIY, Beny Suharsono, mengatakan efisiensi paling signifikan terjadi pada danais dengan angka penghematan mencapai Rp200 miliar. "Angka ini masih bisa bertambah," ujarnya, Jumat (14/2). Dari kantong APBD reguler, efisiensi telah mencapai lebih dari Rp60 miliar.

Pemda DIY menyebut kini tengah merapikan sejumlah program agar efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memangkas perjalanan dinas hingga 50%. "Perjalanan dinas terpangkas 50 persen, itu langkah pertama. Kemudian kami memastikan efisiensi di sektor lain tetap mendukung pelayanan publik," kata Beny.

Beny juga menambahkan, efisiensi bukan sekadar mengurangi angka anggaran, tetapi juga memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara optimal. Ia mencontohkan *refocusing* anggaran dialihkan untuk sejumlah program yang lebih berdampak bagi masyarakat, seperti layanan pendidikan dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Terkait dengan wacana *work from anywhere* (WFA) untuk ASN dalam rangka efisiensi, Beny menyatakan jajarannya belum merancang kebijakan tersebut. "Kami belum mendesain sampai ke sana, tapi langkah-langkah penghematan seperti listrik dan kendaraan dinas sudah kami terapkan lebih dulu," katanya.

Di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menjelaskan jajarannya juga melakukan efisiensi hingga 50%. Salah satu fokus utama penghematan adalah mengurangi kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel. "Kami menekan biaya kegiatan di hotel dan memaksimalkan penggunaan kantor. Selain itu, kegiatan yang bisa diorganisasi lebih efisien juga akan kami sisir," kata Suhirman.

Ia memastikan, efisiensi tidak berdampak pada proses pembelajaran di sekolah, karena pendanaan untuk siswa masih didukung oleh Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). "Pembelajaran tetap berjalan seperti biasa, efisiensi tidak akan mengorbankan hak siswa," katanya.

Terkait dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp42 miliar, Suhirman menyebut dana tersebut tetap digunakan untuk fasilitas sekolah, termasuk untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) yang masih membutuhkan dukungan. "Kami berupaya memastikan bahwa penghematan anggaran tidak mengurangi kualitas layanan publik, tetapi justru mengarah pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat," katanya.